

	News Title : Bappebti Bantah Gagal Kelola Aset Kripto: Masalah Muncul Sejak 2018, Tapi Relatif Teratasi	
	Media Name : tempo.co	Journalist : Antara
	Publish Date : 04 January 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : Pengawasan Kripto

Beranda > **Bisnis**

Bappebti Bantah Gagal Kelola Aset Kripto: Masalah Muncul Sejak 2018, Tapi Relatif Teratasi

Reporter: **Antara**
Editor: **Br. Arlyani Yaldi Widayastuti**

Rabu, 4 Januari 2023 15:05 WIB



Rubrikasi aset kripto. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan Tugas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**Bappebti**) Didid Noordiatmoko angkat bicara soal alasan pengelolaan [aset kripto](#) dan perdagangan derivatif yang kini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ia menjelaskan bahwa peralihan pengelolaan tersebut bukan karena Bappebti selama ini dinilai gagal mengelola.

Baca: Bappebti : Jumlah Pemilik Aset Kripto di Indonesia Naik tapi Transaksinya Merosot

Konflik di Papua menimbulkan gelombang pengungsian nyaris tanpa henti. Sejumlah anak meninggal karena gizi buruk. [Baca Sekarang](#)

"Tidak ada hal yang mengatakan Bappebti gagal mengelola kedua hal tersebut. Bahwa kedua hal ini masih banyak catatan, iya. Tapi kalo disebut dengan kegagalan, masih jauh," kata Didi dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2023.

Didi menyatakan, aktivitas kripto maupun derivatif yang terkait dengan sekuritas dan mata uang terus tumbuh sejak tahun 2018. Sejak saat itu, permasalahan terus ada tapi relatif dapat diatasi.

"Kalau kita bandingkan dengan rasio antara permasalahan dengan yang teratasi itu di bawah 0 persen, jadi sangat kecil," kata Didi.

Nah, soal peralihan pengelolaan dari Bappebti ke [OJK](#), kata Didi, didasarkan pada Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) atau UU Omnibus Law di bidang keuangan.

Dalam beleid itu diatur ada waktu selama 24 bulan untuk transisi. Soal transisi ini pun akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang akan disusun dalam waktu enam bulan.

Lebih jauh, Didid membeberkan pengelolaan aset kripto dan perdagangan derivatif berpindah. Salah satunya adalah laporan Financial Stability Board (FSB) pada tahun 2022 yang menyebutkan pertumbuhan nilai aset kripto yang pesat dapat berdampak pada nilai keuangan.

"Sehingga kita saat itu sepakat untuk menghasilkan kebijakan publik harus *forward looking*, tidak hanya melihat sisi histori saja, tetapi ke depannya ini nanti seperti apa," kata Didi.

Dengan mempertimbangkan prediksi dampak yang timbul akibat stabilisasi keuangan dan kompleksitas, maka antisipasi harus dilakukan dengan pemindahan dua poin tersebut ke OJK.

"Jadi pemerintah maupun DPR *forward looking*, jangan sampai ada masalah baru kita rebut," ucap Didi.

Selama pengalihan belum dilakukan, kata Didi, maka pengawasan, pembinaan, dan kebijakan aset kripto serta perdagangan derivatif tetap ada di Bappebti.